



STATISTIK
KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2017

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2017

ISSN : 26140624
Nomor Publikasi : 74540.1803

Nomor Katalog : 7201001.74
Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm :
Jumlah Halaman xii +117 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
© BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Dicetak Oleh :
CV. Tumaka

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara memuat data tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan yang terpilih secara acak sebagai sampel Tahun Anggaran 2014–2016 dan rencana anggaran tahun 2017. Data tersebut dihimpun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen data.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang telah membantu mewujudkan penerbitan publikasi ini dengan memberikan data dan laporannya.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data. Saran dan kritik yang konstruktif diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan terbitan mendatang.

Kendari, Februari 2018

Badan Pusat Statistik
Kepala Provinsi Sulawesi Tenggara



ATQO MARDIYANTO, M. Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kegunaan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	2
1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data	3
1.4 Konsep dan Definisi	3
II ULASAN RINGKAS	7
2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	7
2.2 Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	8
2.3 Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	10
2.4 Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10
2.5 Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12
2.6 Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15
2.7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan	17
2.8 Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan	20
LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL***Halaman***

Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun 2017 Menurut Jenis Pendapatan dan Distribusi Pendapatan.....	8
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah)	11
Tabel 2.3	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Belanja Tahun 2017 (Juta Rupiah).....	13
Tabel 2.4	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Juta Rupiah).....	17
Tabel 2.5	Jumlah Desa/Kelurahan Sampel Penghitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan Per Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016	18
Tabel 2.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel Menurut Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Ribu Rupiah)	19
Tabel 2.7	Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel Menurut Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Ribu Rupiah)	20

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pendapatan, Tahun Anggaran 2016 (Persen)	8
Grafik 2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja, Tahun Anggaran 2016 (Persen)	9
Grafik 3 Rencana Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja, Tahun Anggaran 2017 (Persen)	9
Grafik 4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017 (Miliar Rupiah)	12
Grafik 5 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017 (Miliar Rupiah)	14
Grafik 6 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Miliar Rupiah)	15
Grafik 7 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Miliar Rupiah)	16
Grafik 8 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel Menurut Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Juta Rupiah).....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pendapatan, Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah).....	23
Lampiran 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja, Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah).....	43
Lampiran 3	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pembiayaan, Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah)	63
Lampiran 4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pendapatan, Tahun Anggaran 2014-2016 (Ribu Rupiah).....	83
Lampiran 5	Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja, Tahun Anggaran 2014-2016 (Ribu Rupiah).....	101

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaran pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang makin dibatasi dalam desentralisasi fiskal. Diharapkan dengan adanya kewenangan tersebut daerah otonom dapat memperoleh sumber pembiayaan dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga merupakan kewajiban yang harus dibuat setiap akhir pelaksanaan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Oleh karena itu angka yang tertera dalam APBDes bukanlah sekedar angka-angka yang tanpa makna, tetapi merupakan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan. Sebagai informasi, setiap tahun baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/ Kota mengumpulkan data keuangan daerah yang terdiri dari Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Keuangan Desa/Kelurahan.

1.2 Kegunaan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum statistik keuangan pemerintah daerah diperlukan antara lain:

- a. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel *input-output*, dan neraca arus dana.
- b. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.
- c. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
- d. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh dari Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan data keuangan Kabupaten/Kota diperoleh dari Kantor Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, data statistik Keuangan Pemerintah Desa/Kelurahan diperoleh dari 192 desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel. Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan dikompilasi oleh petugas statistik ke dalam daftar/kuesioner K-1, K-2, dan K-3 yang telah disiapkan BPS. Periode data yang dicakup dalam sajian ini adalah berdasarkan tahun fiskal/anggaran.

1.4 Konsep dan Definisi

Keuangan Pemerintah daerah terbagi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

1.4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.4.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari: bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

1.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.4.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah ini terdiri dari: Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

1.4.2.1 Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

1.4.2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

1.4.3 Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan sebagai bagian dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

II. ULASAN RINGKAS

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sangat bergantung tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) maupun sumber dana yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, dan atau setingkat di atasnya bagi pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Demikian pula bagi Keuangan Pemerintah Desa, mengingat sumber-sumber pendapatan asli desa masih sangat minim, belum dapat tergali dan tereksplorasi secara memadai. Seiring dengan masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang profesional pada tingkat aparat pemerintah desa dan kelurahan, bagian terbesar danadesa bersumber dari bantuan pemerintah setingkat di atasnya maupun proyek-proyek yang berasal dari kementerian yang masuk di desa/kelurahan tersebut sebagai lokasi proyek.

2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Realisasi pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016 adalah Rp. 2.809.721,46 juta, yang terdiri dari bagian Pendapatan Asli Daerah Rp. 756.302,66 Juta atau 26,92 persen; Dana Perimbangan Rp. 2.037.098,80 Juta atau 72,50 persen; dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp.16.320,00 Juta atau 0,58 persen (tabel 1 lampiran 1).

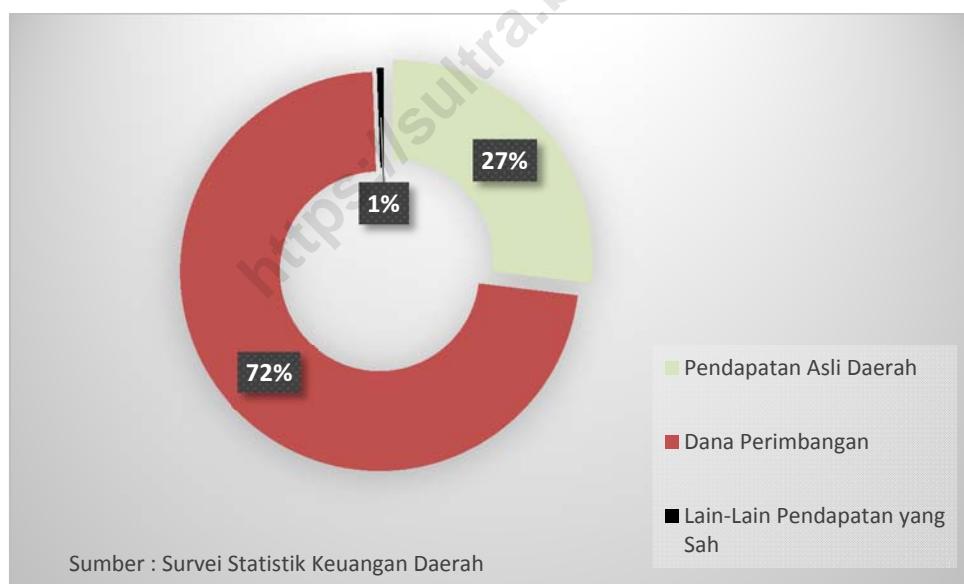
Rencana pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 3.545.198,44 Juta, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 743.891,52 Juta atau 20,98 persen; Dana Perimbangan Rp. 2.748.755,75 Juta atau 77,53 persen; dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp.52.551,17 Juta atau 1,48 persen.

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016
Dan Rencana Pendapatan Tahun 2017
Menurut Jenis Pendapatan dan Distribusi Pendapatan

Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi 2016 (Juta Rp)	%	Rencana 2017 (Juta Rp)	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Pendapatan Asli Daerah	756.302,66	26,92	743.891,52	20,98
2. Dana Perimbangan	2.037.098,80	72,50	2.748.755,75	77,53
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	16.320,00	0,58	52.551,17	1,48
Jumlah	2.809.721,46	100,00	3.545.198,44	100,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2016
(Persen)



2.2 Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

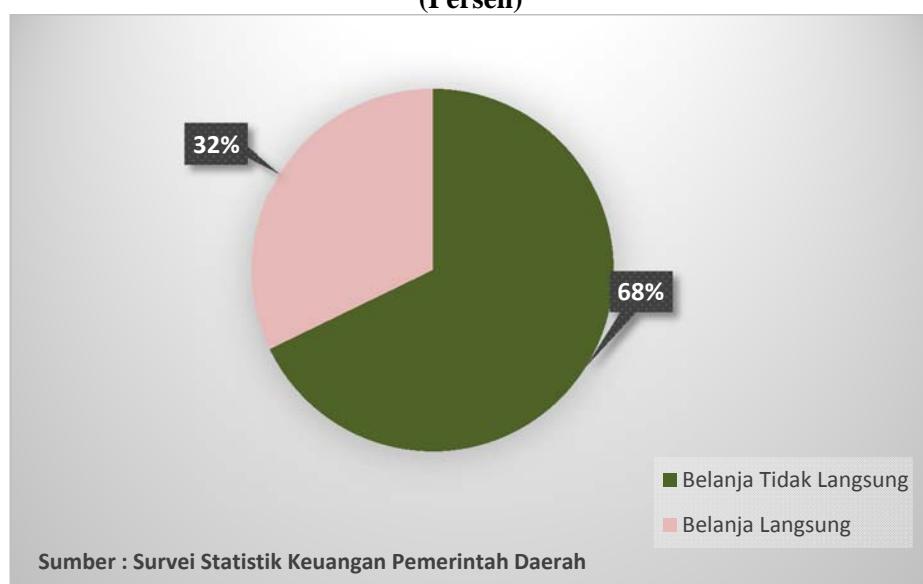
Realisasi pendapatan pemerintah daerah memberi dampak pada realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Realisasi belanja pemerintah daerah tahun anggaran 2016 tercatat Rp.2.663.870,37 Juta yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.1.466.650,01 Juta atau 55,06 persen dan Belanja Langsung

Rp.1.197.220,36 Juta atau 44,94 persen. Realisasi belanja pemerintah daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 13,39 persen dibandingkan tahun 2015 (tabel 19 lampiran 2).

Grafik 2
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2016
(Persen)



Grafik 3
Rencana Belanja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2017
(Persen)



Rencana belanja pemerintah pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.597.160,28 Juta yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.439.650,18 Juta atau 67,82 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.157.510,10 Juta atau 32,18 persen.

2.3 Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Realisasi pembiayaan pemerintah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.450.595,34 Juta berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 450.595,34 Juta. Pengeluaran Pembiayaan daerah Rp. 95.134,45 juta berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.12.000,00 Juta, dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.83.134,45 Juta (tabel 37 lampiran 3).

2.4 Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Pada tabel 2.2 yang tersaji dibawah ini, terlihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016 yang terbesar adalah Kota Kendari sebesar Rp.1.394.768,12 Juta, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 179.062,77 Juta atau 12,84 persen, Dana Perimbangan Rp. 1.058.027,54 Juta atau 75,86 persen dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp.157.677,81 Juta atau 11,30 persen. Realisasi pendapatan tersebut naik sebesar 20,63 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2015.

Sedangkan realisasi pendapatan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 yang terkecil adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 510.243,75 Juta, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 9.717,84 Juta atau 1,90 persen, Dana Perimbangan Rp. 447.649,41 Juta atau 87,73 persen, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 52.876,50 Juta atau 10,36 persen.

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016
dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

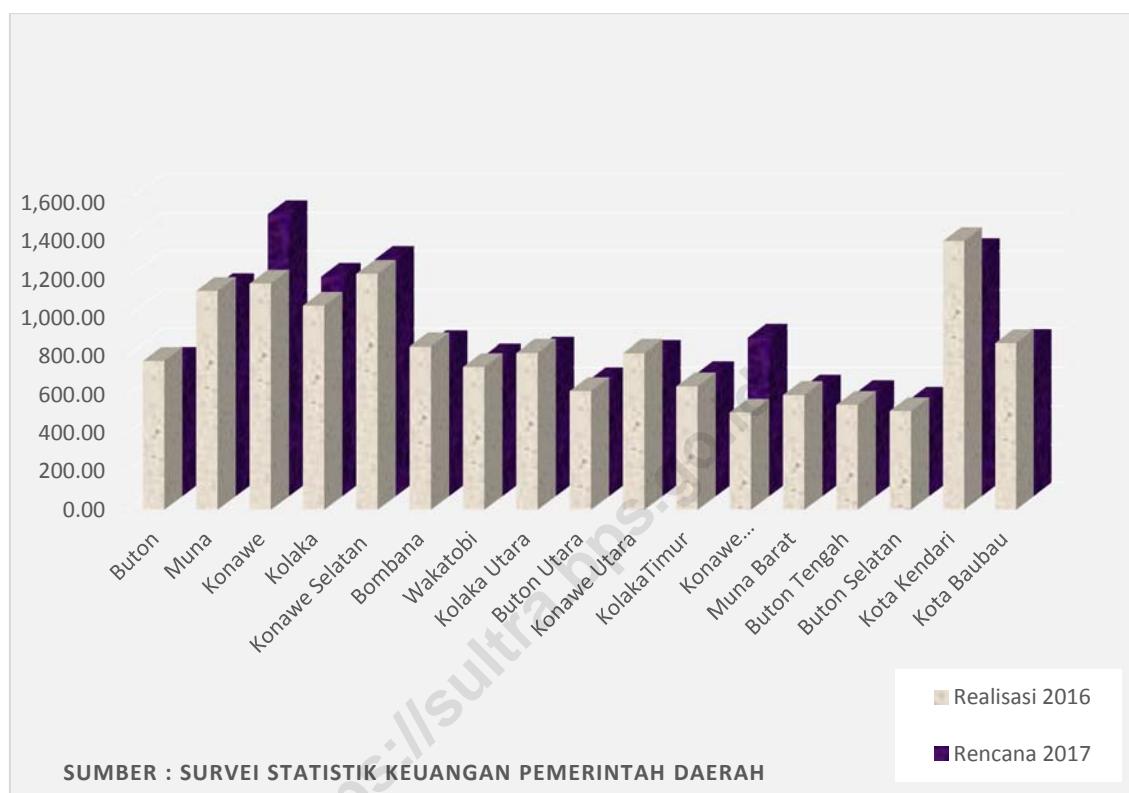
Kabupaten/Kota <i>1</i>	Realisasi 2016 <i>2</i>	Rencana 2017 <i>3</i>
1. Buton	777.193,14	706.124,20
2. Muna	1.136.702,73	1.084.898,75
3. Konawe	1.174.856,95	1.462.337,77
4. Kolaka	1.060.128,47	1.139.121,35
5. Konawe Selatan	1.225.185,45	1.226.117,67
6. Bombana	850.047,40	790.351,24
7. Wakatobi	745.334,77	721.095,39
8. Kolaka Utara	817.539,82	756.554,42
9. Buton Utara	621.108,51	602.579,92
10. Konawe Utara	816.648,20	739.944,38
11. Kolaka Timur	645.555,90	632.466,72
12. Konawe Kepulauan	510.243,75	523.304,75
13. Muna Barat	600.823,88	562.875,60
14. Buton Tengah	549.434,61	534.773,59
15. Buton Selatan	517.704,51	499.806,92
16. Kota Kendari	1.394.768,12	1.266.447,60
17. Kota Baubau	866.176,70	797.729,49

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk rencana pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun Anggaran 2017 yang terbesar adalah Kabupaten Konawe yaitu sebesar Rp.1.462.337,77 Juta atau naik 9,15 persen, dan terkecil adalah Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp. 499.806,92 Juta. Realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota tahun 2016 dan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2017 menurut jenis pendapatan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1 (tabel 2 sampai dengan tabel 18).

Grafik 4

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan
Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Miliar Rupiah)**



2.5 Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi belanja pemerintah daerah dari sebanyak 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016 dan rencana belanja pemerintah tahun 2017 disajikan pada tabel 2.3 di bawah ini.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki realisasi belanja pemerintah daerah tahun anggaran 2016 terbesar adalah Kota Kendari sebesar Rp. 1.416.199,28 Juta. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki realisasi belanja pemerintah daerah tahun anggaran 2016 terkecil di adalah Kabupaten Buton Selatan yaitu sebesar Rp. 466.813,32Juta.

Pada rencana belanja pemerintah tahun 2017, Kabupaten Konawe memiliki rencana belanja pemerintah yang terbesar diantara kabupaten/kota yang lain yaitu sebesar Rp.1.636.150,42 Juta. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki

rencana belanja pemerintah tahun anggaran 2017 terkecil adalah Kabupaten Buton Selatan, yakni sebesar Rp. 513.786,92 Juta. Untuk lebih jelasnya, rincian realisasi dan rencana belanja pemerintah kabupaten/kota menurut jenis belanja dapat dilihat pada lampiran 2 (tabel 19 sampai dengan tabel 36).

Tabel 2.3
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016
dan Rencana Belanja Tahun 2017
(Juta Rupiah)

	Kabupaten/Kota <i>I</i>	Realisasi 2016 <i>2</i>	Rencana 2017 <i>3</i>
1.	Buton	787.226,00	756.946,74
2.	Muna	1.238.622,35	1.103.792,10
3.	Konawe	1.189.502,02	1.636.150,42
4.	Kolaka	1.055.207,53	1.149.771,35
5.	Konawe Selatan	1.191.086,98	1.265.141,01
6.	Bombana	860.382,99	796.351,24
7.	Wakatobi	746.959,56	736.072,70
8.	Kolaka Utara	872.676,62	848.448,85
9.	Buton Utara	638.194,93	616.190,30
10.	Konawe Utara	805.117,99	754.144,86
11.	Kolaka Timur	621.370,71	632.466,52
12.	Konawe Kepulauan	524.672,60	539.354,75
13.	Muna Barat	505.329,08	679.905,90
14.	Buton Tengah	543.055,58	551.916,64
15.	Buton Selatan	466.813,32	513.786,92
16.	Kota Kendari	1.416.199,28	1.266.447,60
17.	Kota Baubau	899.053,96	847.355,12

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

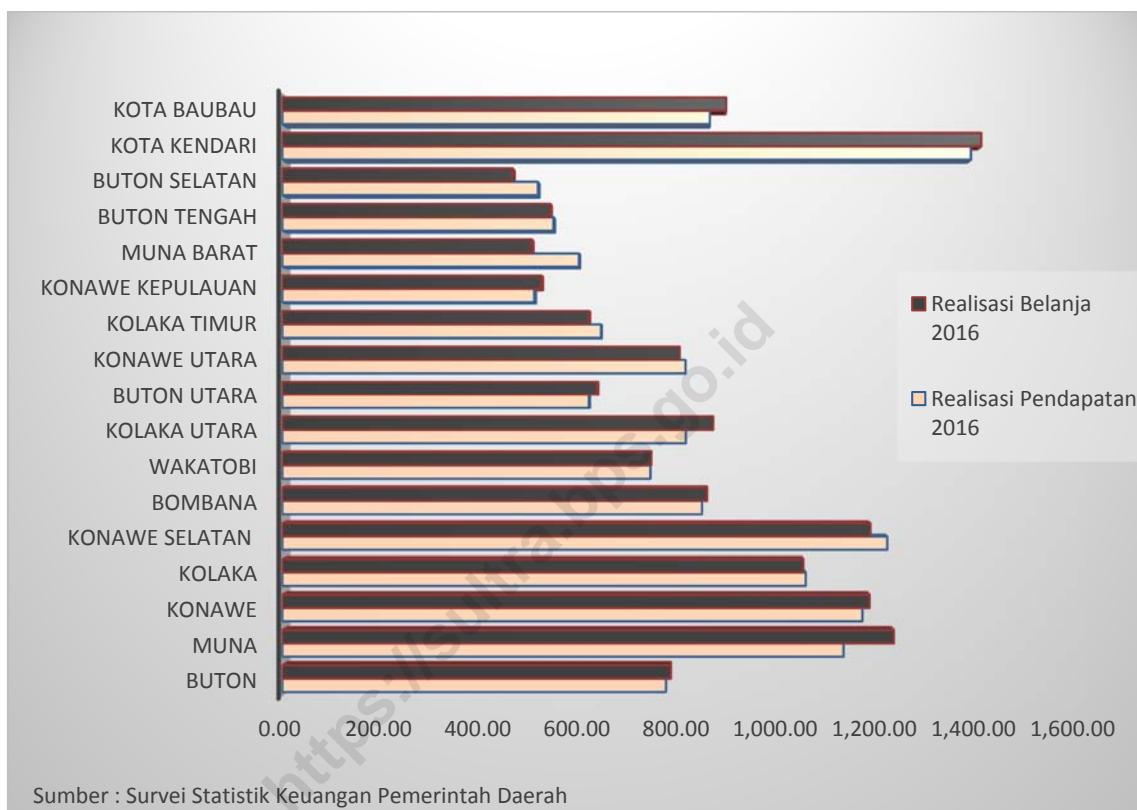
Grafik 5
**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan
Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017**
(Miliar Rupiah)



Grafik 6 dibawah ini menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja pada tahun 2016 dari masing-masing kabupaten/kota. Pada grafik tersebut terlihat bahwa 7 (tujuh) kabupaten/kota memiliki nilai realisasi pendapatan lebih besar dari pada belanja, yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan.

Sementara itu, terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota memiliki nilai realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanjanya, diantaranya adalah Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

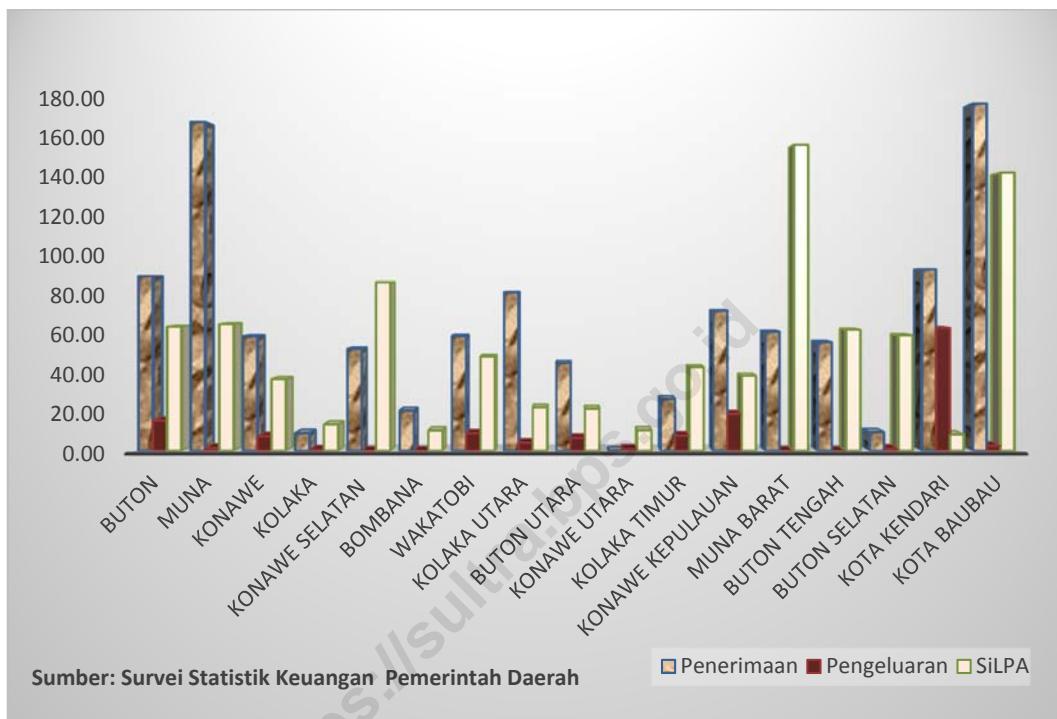
Grafik 6
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016
(Miliar Rupiah)



2.6 Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi pembiayaan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada Tahun Anggaran 2016, Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah kabupaten/kota tertinggi adalah Kota Baubau sebesar Rp. 178.021,97 Juta, dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah terendah adalah Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 9.167,71 Juta. Bahkan di Kabupaten Konawe Utara, Realisasi Penerimaan Pembiayaannya tercatat sebesar Rp. 0,00.

Grafik 7
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016
(Miliar Rupiah)



Pada Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah, tercatat sebesar Rp. 0,00. Meski demikian, di Kota Kendari tercatat sebesar Rp. 63.278,33 Juta yang merupakan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah tertinggi di tahun 2016. Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah terendah adalah Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 500,00 Juta. Secara rinci, Realisasi Pembiayaan pemerintah daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2016
(Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Realisasi Pembiayaan		
	Penerimaan	Pengeluaran	SiLPA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Buton	89.599,21	15.611,43	63.954,96
2. Muna	168.655,36	1.497,11	65.238,63
3. Konawe	59.057,08	7.480,67	36.931,34
4. Kolaka	9.167,71	500,00	13.588,65
5. Konawe Selatan	52.564,51	0,00	86.662,98
6. Bombana	20.805,09	0,00	10.469,50
7. Wakatobi	59.229,46	9.029,12	48.575,55
8. Kolaka Utara	81.629,67	4.100,69	22.392,18
9. Buton Utara	45.434,63	6.642,00	21.706,21
10. Konawe Utara	0,00	1.000,00	10.530,21
11. Kolaka Timur	26.765,07	7.801,01	43.149,25
12. Konawe Kepulauan	72.194,20	19.048,81	38.716,54
13. Muna Barat	61.430,12	0,00	156.924,92
14. Buton Tengah	55.993,01	0,00	62.372,04
15. Buton Selatan	9.631,01	1.000,00	59.522,20
16. Kota Kendari	93.104,30	63.278,33	8.394,81
17. Kota Baubau	178.021,97	2.530,10	142.614,61

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

2.7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan

Salah satu cara untuk melihat kemampuan desa/kelurahan dalam menyelenggarakan rumah tangganya adalah dengan mengamati bagaimana pemerintah desa/kelurahan mampu menggali sumber dana secara optimal dari potensi yang ada di desa/kelurahan, dan informasi ini bisa tercermin pada Pendapatan Asli Desa/kelurahan (PAD). Pendapatan Asli Desa/kelurahan sebagai salah satu komponen pendapatan desa dapat digunakan sebagai ukuran atau indikator untuk melihat kemampuan desa/kelurahan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Ulasan Ringkas

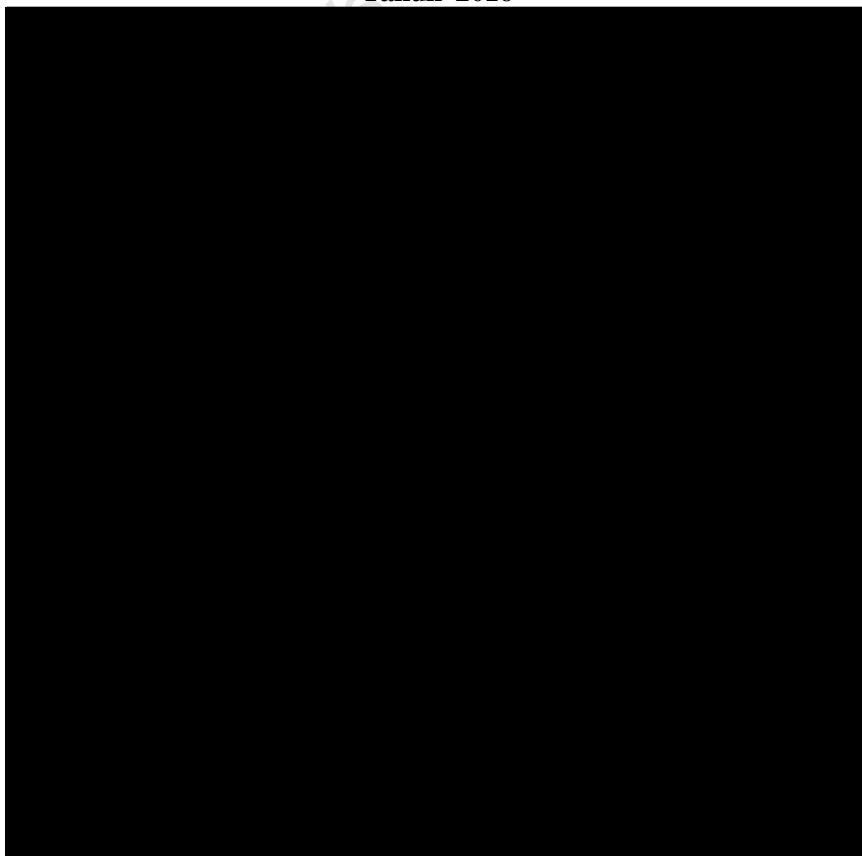
Jumlah desa/kelurahan sampel dalam penghitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa/kelurahan di kabupaten se Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel 2.5, dan pada tabel 2.6 dapat dilihat Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/kelurahan sampel selama periode tahun anggaran 2016.

Terdapat perbedaan publikasi tahun ini dengan publikasi terbitan sebelumnya mengenai keuangan pemerintah desa/kelurahan. Pada publikasi kali ini, sudah termuat informasi keuangan daerah pemerintahan desa/kelurahan untuk daerah pemekaran baru, yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.

Selain itu, terdapat perbedaan rincian pendapatan dan belanja keuangan pemerintah desa/kelurahan dibandingkan dengan publikasi sebelumnya. Hal ini karena ada perubahan jenis kuesioner yang digunakan dalam melakukan pendataan. Tipe pendapatan atau belanja antara desa dan kelurahan juga sudah tidak dibedakan lagi pada publikasi ini.

Tabel 2.5

**Jumlah Desa/Kelurahan dan Sampel Penghitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Desa/Kelurahan Per Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2016**

A large black rectangular redaction box covers the majority of the page below the caption, obscuring the data for Table 2.5.

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel
Menurut Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2016
(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Realisasi Pendapatan		
		<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
1. Buton	7.635.963,00		
2. Muna	11.788.692,00		
3. Konawe	19.497.258,00		
4. Kolaka	10.050.244,00		
5. Konawe Selatan	28.593.025,00		
6. Bombana	11.705.390,00		
7. Wakatobi	14.368.270,00		
8. Kolaka Utara	11.616.731,00		
9. Buton Utara	4.845.885,00		
10. Konawe Utara	12.312.101,00		
11. Kolaka Timur	13.837.265,00		
12. Konawe Kepulauan	6.304.645,00		
13. Muna Barat	5.286.744,00		
14. Buton Tengah	7.609.273,00		
15. Buton Selatan	6.510.383,00		

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Dari Tabel 2.6 terlihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah desa/kelurahan sampel terbesar adalah Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar Rp. 28.593.025,00 Ribu dengan sampel 35 desa/kelurahan atau rata-rata realisasi pendapatan tiap desa sebesar Rp. 816.943,57 Ribu. Realisasi pendapatan tersebut terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp. 28.521.055,00 Ribu atau 99,75 Persen, dimana rincian yang terbesarnya berasal dari Dana Desa sebesar Rp. 20.722.390,00 Ribu. Pendapatan terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 69.114,00 Ribu atau 0,24 Persen, dan yang ketiga berasal dari Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 2.856,00 Ribu atau 0,01 Persen. Lebih rinci realisasi pendapatan pemerintah desa/kelurahan sampel menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada lampiran 4 (tabel 55 sampai dengan tabel 69).

2.8 Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan

Besarnya belanja pemerintah desa/kelurahan yang dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan, tidak terlepas dari besarnya dana hasil pendapatan. Belanja pemerintah desa/kelurahan mulai tahun 2016, terbagi menurut bidang kegiatan, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga. Pada tabel 2.7 disajikan realisasi belanja pemerintah desa/kelurahan sampel di kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode Tahun Anggaran 2016.

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel
Menurut Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2016
(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota (1)	Realisasi Belanja (2)
1. Buton	7.696.451,00
2. Muna	12.392.618,00
3. Konawe	18.461.035,00
4. Kolaka	9.604.808,00
5. Konawe Selatan	27.349.000,00
6. Bombana	11.736.395,00
7. Wakatobi	19.398.423,00
8. Kolaka Utara	11.614.565,00
9. Buton Utara	4.850.553,00
10. Konawe Utara	11.145.289,00
11. Kolaka Timur	13.522.531,00
12. Konawe Kepulauan	6.304.645,00
13. Muna Barat	5.265.725,00
14. Buton Tengah	7.548.157,00
15. Buton Selatan	6.476.724,00

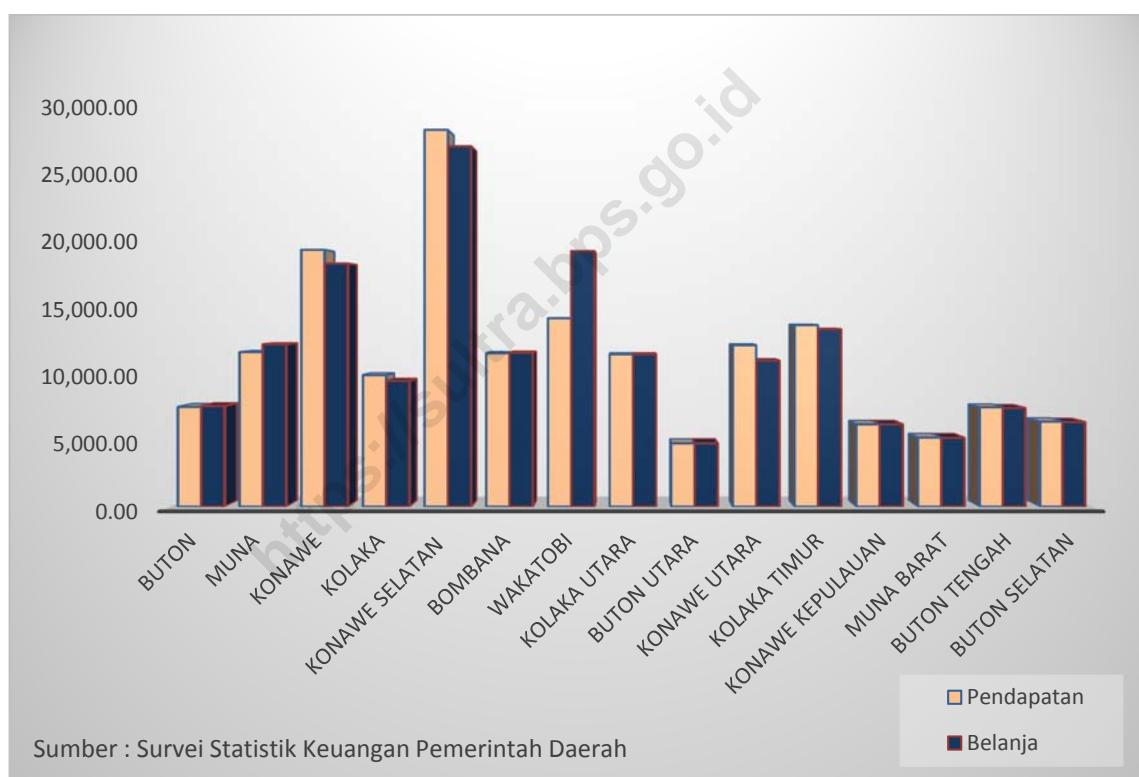
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Dari Tabel 2.7 diatas, terlihat bahwa realisasi belanja pemerintah desa/kelurahan sampel terbesar adalah Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar adalah Rp .27.349.000,00 Ribu atau rata-rata Rp. 781.400,00 Ribu per desa/kelurahan. Realisasi Belanja tersebut sebagian besar digunakan pada Belanja

Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu sebesar Rp. 17.838.483,00 Ribu atau 65,23 Persen. Lebih jelasnya Realisasi Belanja Pemerintah desa/kelurahan sampel menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada lampiran 5 (tabel 70 sampai dengan tabel 84).

Jika dibandingkan antara nilai Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja untuk masing-masing kabupaten maka akan diperoleh perbandingan seperti tersaji pada grafik 8 berikut.

Grafik 8
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel
Menurut Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2016
(Juta Rupiah)



Dari grafik 8 dapat dilihat bahwa terdapat 10 kabupaten yang memiliki nilai Realisasi Pendapatan lebih besar dari nilai Realisasi Belanja yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Buton Selatan. Dengan selisih terbesar antara nilai Realisasi Pendapatan dengan nilai Realisasi Belanja adalah Kabupaten Konawe Utara.

Ulasan Ringkas

Di Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Buton Utara tercatat Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Desa/Kelurahan lebih kecil dari belanjanya. Sedangkan di Kabupaten Konawe Kepulauan, realisasi pendapatan besarnya sama dengan realisasi belanja pemerintah desa/kelurahan.

<https://sultra.bps.go.id>

1

Lampiran

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Sulawesi
Tenggara Menurut Jenis Pendapatan, Tahun
Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan
Tahun Anggaran 2017**

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	2.471.388,95	2.809.721,46	3.545.198,44	
1. Pendapatan Asli Daerah	667.079,21	756.302,66	743.891,52	
1.1. Hasil Pajak Daerah	516.470,92	579.776,26	628.119,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	17.728,74	13.243,20	11.971,88	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.653,08	23.412,41	23.450,51	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.226,47	139.870,79	80.350,13	
2. Dana Perimbangan	1.383.850,90	2.037.098,80	2.748.755,75	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	121.027,37	97.654,36	99.073,10	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.176.423,58	1.200.634,20	1.602.253,85	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	86.399,95	738.810,24	1.047.428,80	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	420.458,84	16.320,00	52.551,17	
3.1. Pendapatan Hibah	17.378,02	11.320,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	403.080,82	5.000,00	52.551,17	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	
3.6. Lainnya	0,00	0,00	0,00	

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH		604.603,45	777.193,14	706.124,20
1. Pendapatan Asli Daerah		24.778,97	39.141,77	16.624,93
1.1. Hasil Pajak Daerah	3.122,10	2.201,13	1.918,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	5.319,77	7.517,90	7.371,18	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.527,64	4.604,69	3.604,69	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.809,46	24.818,05	3.731,06	
2. Dana Perimbangan		407.089,18	628.601,86	598.248,32
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.917,62	17.233,56	17.601,88	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	252.280,18	427.465,43	443.042,67	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	135.891,38	183.902,87	137.603,77	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah		172.735,30	109.449,51	91.250,95
3.1. Pendapatan Hibah	0,00	13.985,56	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	12.948,27	19.157,99	8.049,92	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	157.938,15	22.556,97	7.500,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.643,38	1.440,00	10.000,00	
3.6. Dana Desa		52.097,35	65.701,03	
3.7. Lainnya	205,50	211,64	0,00	

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH		990.098,81	1.136.702,73	1.084.898,75
1. Pendapatan Asli Daerah		38.272,71	39.775,36	58.876,30
1.1. Hasil Pajak Daerah	3.999,35	5.788,31	5.513,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	13.797,48	14.020,01	28.863,30	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.461,26	3.069,80	3.500,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.014,62	16.897,24	21.000,00	
2. Dana Perimbangan		722.488,62	995.269,20	917.836,49
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.033,80	14.573,36	15.053,94	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	502.390,81	669.896,27	669.896,27	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	203.064,01	310.799,57	232.886,28	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah		229.337,48	101.658,17	108.185,96
3.1. Pendapatan Hibah	15.073,14	1.497,11	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	15.008,60	20.873,71	10.405,25	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	196.431,98	0,00	97.780,71	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.821,76	2.505,00	0,00	
3.6. Dana Desa		76.782,35	0,00	
3.7. Lainnya	2,00	0,00	0,00	

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.076.320,16	1.174.856,95	1.462.337,77	
1. Pendapatan Asli Daerah	56.039,77	57.702,18	127.726,10	
1.1. Hasil Pajak Daerah	13.060,34	10.304,40	53.105,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	14.519,33	7.325,08	22.470,10	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.933,77	3.909,38	4.000,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.526,33	36.163,32	48.151,00	
2. Dana Perimbangan	804.039,03	939.157,89	904.134,47	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.261,28	18.036,67	20.309,48	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	639.180,85	690.044,91	715.033,40	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	136.596,90	231.076,31	168.791,59	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	216.241,36	177.996,88	430.477,20	
3.1. Pendapatan Hibah	15.571,92	2.219,35	500,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	16.788,50	24.423,85	11.869,09	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	113.739,74	0,00	52.010,06	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.640,88	5.280,00	750,00	
3.6. Dana Desa		0,00	0,00	
3.7. Lainnya	64.500,32	146.073,68	365.348,05	

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.051.038,97	1.060.128,47	1.139.121,35	
1. Pendapatan Asli Daerah	66.365,25	72.205,07	80.163,29	
1.1. Hasil Pajak Daerah	13.468,69	19.473,06	18.453,24	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	6.722,63	6.469,87	9.856,65	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.635,20	8.963,84	7.635,20	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.538,73	37.298,30	44.218,20	
2. Dana Perimbangan	859.446,80	873.287,76	828.507,00	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105.064,92	64.788,54	72.125,05	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	572.933,35	593.123,36	593.123,37	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	181.448,53	215.375,86	163.258,58	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	125.226,92	114.635,64	230.451,06	
3.1. Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	23.881,86	37.274,09	15.062,49	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	88.938,00	61.871,55	78.405,60	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.386,97	2.190,00	10.000,00	
3.6. Dana Desa		0,00	0,00	
3.7. Lainnya	10.020,09	13.300,00	126.982,97	

Tabel 6
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.055.373,29	1.225.185,45	1.226.117,67	
1. Pendapatan Asli Daerah	43.850,46	48.028,70	52.424,87	
1.1. Hasil Pajak Daerah	8.032,93	10.332,42	7.670,50	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	2.277,44	3.181,46	4.175,70	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.108,47	3.960,04	3.960,03	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.431,62	30.554,78	36.618,64	
2. Dana Perimbangan	811.636,99	879.945,26	902.094,48	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.918,62	31.536,80	28.056,21	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	598.467,03	666.694,03	691.163,67	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	161.251,34	181.714,43	182.874,60	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	199.885,84	297.211,49	271.598,32	
3.1. Pendapatan Hibah	10,00	250,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	15.990,94	24.046,63	19.265,80	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	177.997,14	267.334,86	252.332,52	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.887,76	5.580,00	0,00	
3.6. Dana Desa	0,00	0,00	0,00	
3.7. Lainnya	0,00	0,00	0,00	

Tabel 7
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	722.197,46	850.047,40	790.351,24	
1. Pendapatan Asli Daerah	29.646,97	31.274,21	37.895,37	
1.1. Hasil Pajak Daerah	6.191,59	5.389,75	6.667,37	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	6.095,16	4.305,55	2.175,00	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.588,34	9.390,81	9.000,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.771,88	12.188,10	20.053,00	
2. Dana Perimbangan	571.711,20	687.828,54	579.524,12	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.600,85	27.742,12	12.518,92	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	435.541,50	481.299,89	481.431,20	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	94.568,85	178.786,53	85.574,00	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	120.839,29	130.944,65	172.931,75	
3.1. Pendapatan Hibah	0,00	6.000,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	12.133,22	16.473,83	8.130,00	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	106.302,59	103.871,88	164.801,75	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.403,48	2.340,00	0,00	
3.6. Dana Desa		0,00	0,00	
3.7. Lainnya	0,00	2.258,94	0,00	

Tabel 8
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	673.556,56	745.334,77	721.095,39	
1. Pendapatan Asli Daerah	24.671,82	25.029,15	27.867,28	
1.1. Hasil Pajak Daerah	5.684,71	5.880,36	6.643,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	2.575,02	966,38	1.920,03	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.190,92	7.374,57	7.374,57	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.221,17	10.807,84	11.929,68	
2. Dana Perimbangan	550.344,30	655.542,81	617.945,67	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.911,27	15.347,60	15.430,25	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	402.871,10	448.607,75	448.658,43	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	125.561,93	191.587,46	153.856,99	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	98.540,44	64.762,81	75.282,44	
3.1. Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	8.204,45	11.041,54	7.117,60	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	88.593,76	52.074,00	68.164,84	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.742,23	1.605,00	0,00	
3.6. Dana Desa		0,00	0,00	
3.7. Lainnya	0,00	42,27	0,00	

Tabel 9
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	748.022,01	817.539,82	756.554,42	
1. Pendapatan Asli Daerah	40.531,45	40.246,18	39.711,80	
1.1. Hasil Pajak Daerah	6.844,84	6.815,42	6.766,18	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	2.628,36	2.978,78	2.975,40	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.812,49	9.003,15	9.003,15	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.245,76	21.448,83	20.967,07	
2. Dana Perimbangan	601.333,21	678.684,25	599.142,22	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.364,93	20.183,14	24.275,42	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	451.597,32	469.964,08	471.165,32	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	108.370,96	188.537,03	103.701,48	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	106.157,35	98.609,39	117.700,40	
3.1. Pendapatan Hibah	6.615,49	0,00	5.000,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	9.557,20	13.216,35	6.048,30	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	87.684,86	83.167,41	7.500,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.257,16	2.225,63	0,00	
3.6. Dana Desa	0,00	0,00	99.152,10	
3.7. Lainnya	42,64	0,00	0,00	

Tabel 10
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PENDAPATAN DAERAH	565.278,59	621.108,51	602.579,92
1. Pendapatan Asli Daerah	15.256,54	12.828,35	12.961,40
1.1. Hasil Pajak Daerah	2.593,39	2.102,37	2.107,60
1.2. Hasil Retribusi Daerah	1.862,17	1.510,18	2.113,55
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.896,08	3.383,50	2.896,08
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.904,90	5.832,30	5.844,17
2. Dana Perimbangan	477.805,47	547.677,50	522.957,37
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.815,80	12.862,30	13.281,43
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	379.995,22	408.633,61	409.245,16
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	76.994,45	126.181,59	100.430,78
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	72.216,58	60.602,66	66.661,15
3.1. Pendapatan Hibah	0,00	1.389,59	0,00
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	6.832,77	8.964,98	4.491,17
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	63.249,27	48.853,09	62.169,98
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.480,17	1.395,00	0,00
3.6. Dana Desa	0,00	0,00	0,00
3.7. Lainnya	654,37	0,00	0,00

Tabel 11
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	680.708,87	816.648,20	737.944,38	
1. Pendapatan Asli Daerah	9.255,77	14.806,65	12.750,00	
1.1. Hasil Pajak Daerah	1.309,68	1.570,00	1.289,45	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	1.837,55	2.972,00	3.640,00	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.431,92	1.861,07	2.016,07	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.676,62	8.403,58	5.804,48	
2. Dana Perimbangan	596.359,39	693.938,10	599.030,21	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.767,02	55.925,13	28.778,65	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	433.074,13	459.090,81	459.090,82	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	109.518,24	178.922,16	111.160,74	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	75.093,71	107.903,45	126.164,17	
3.1. Pendapatan Hibah	8.297,00	2.542,83	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	8.126,70	9.073,62	5.342,54	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	56.323,86	93.977,00	120.821,63	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.338,34	2.310,00	0,00	
3.6. Dana Desa	0,00	0,00	0,00	
3.7. Lainnya	7,81	0,00	0,00	

Tabel 12

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)**

Jenis Penerimaan <i>I</i>	Realisasi			Rencana
	2015 <i>2</i>	2016 <i>3</i>	2017 <i>4</i>	
PENDAPATAN DAERAH	531.799,79	645.555,90	632.466,72	
1. Pendapatan Asli Daerah	12.282,73	15.510,55	17.304,14	
1.1. Hasil Pajak Daerah	2.473,79	3.233,41	3.877,78	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	628,60	1.256,80	2.139,45	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	608,80	0,00	1.300,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.571,54	11.020,34	9.986,91	
2. Dana Perimbangan	466.415,11	511.621,44	520.656,90	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.567,69	23.339,87	12.691,21	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	373.775,83	404.289,27	404.812,05	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.071,59	83.992,30	103.153,64	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	53.101,95	118.423,91	94.505,68	
3.1. Pendapatan Hibah	2.000,00	0,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	5.407,31	7.678,36	3.484,65	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	8.178,76	108.570,55	0,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.175,00	2.175,00	0,00	
3.6. Dana Desa	0,00	0,00	91.021,03	
3.7. Lainnya	33.340,88	0,00	0,00	

Tabel 13
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	453.975,55	510.243,75	523.304,75	
1. Pendapatan Asli Daerah	6.930,07	9.717,84	8.114,57	
1.1. Hasil Pajak Daerah	689,78	711,25	728,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	0,00	74,38	115,00	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	306,98	400,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.240,29	8.625,23	6.871,57	
2. Dana Perimbangan	411.764,16	447.649,41	428.866,64	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.034,97	9.426,02	11.915,30	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	299.813,76	312.716,54	330.400,86	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	99.915,43	125.506,85	86.550,48	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	35.281,32	52.876,50	86.323,54	
3.1. Pendapatan Hibah	2.000,00	13,74	8.500,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	5.244,86	6.409,21	6.906,52	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	24.718,32	45.283,55	69.729,02	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.296,12	1.170,00	0,00	
3.6. Dana Desa	0,00	0,00	0,00	
3.7. Lainnya	22,02	0,00	1.188,00	

Tabel 14
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	394.853,03	600.823,88	562.875,60	
1. Pendapatan Asli Daerah	2.969,40	18.475,06	6.760,32	
1.1. Hasil Pajak Daerah	710,40	1.157,45	1.118,95	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	260,00	497,70	1.135,00	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	18,92	0,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.999,00	16.800,99	4.506,37	
2. Dana Perimbangan	347.212,85	522.078,65	488.183,62	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.672,23	9.912,76	10.672,10	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	217.533,02	356.155,87	378.289,59	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	121.007,60	156.010,02	99.221,93	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	44.670,78	60.270,17	67.931,66	
3.1. Pendapatan Hibah	3.000,00	0,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	4.125,55	6.360,10	3.488,15	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	32.090,23	0,00	0,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.455,00	3.455,00	0,00	
3.6. Dana Desa		50.454,98	64.443,51	
3.7. Lainnya	0,00	0,09	0,00	

Tabel 15
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	339.878,40	549.434,61	534.773,59	
1. Pendapatan Asli Daerah	3.498,70	11.183,16	8.255,62	
1.1. Hasil Pajak Daerah	523,02	2.642,73	1.843,61	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	688,69	1.119,42	941,00	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.286,99	7.421,01	5.471,01	
2. Dana Perimbangan	303.111,01	482.198,64	468.027,48	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7.499,00	11.226,95	11.472,93	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	225.671,01	361.617,69	374.712,90	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	69.941,00	109.354,00	81.841,65	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	33.268,69	56.052,81	58.490,49	
3.1. Pendapatan Hibah	5.000,00	3.000,00	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	3.941,58	6.966,02	4.464,41	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	0,00	42.825,13	0,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.245,00	3.260,00	0,00	
3.6. Dana Desa		0,00	54.026,08	
3.7. Lainnya	19.082,11	1,66	0,00	

Tabel 16

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)**

Jenis Penerimaan <i>I</i>	Realisasi			Rencana
	2015 <i>2</i>	2016 <i>3</i>	2017 <i>4</i>	
PENDAPATAN DAERAH	193.215,01	517.704,51	499.806,92	
1. Pendapatan Asli Daerah	1.865,07	7.666,53	4.504,87	
1.1. Hasil Pajak Daerah	409,94	1.390,17	1.023,60	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	409,22	489,39	430,25	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.045,91	5.786,97	3.051,02	
2. Dana Perimbangan	157.471,10	444.118,78	427.094,28	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6.650,45	10.195,74	10.985,58	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	150.820,65	338.573,96	340.369,77	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	95.349,08	75.738,93	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	33.878,84	65.919,20	68.207,77	
3.1. Pendapatan Hibah	2.350,00	17.000,00	14.000,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	3.861,47	6.599,49	4.687,68	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	17.427,62	39.120,73	0,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.239,75	3.080,00	0,00	
3.6. Dana Desa		0,00	49.520,09	
3.7. Lainnya	0,00	118,98	0,00	

Tabel 17
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Kendari Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
	I	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.156.242,86	1.394.768,12	1.266.447,60	
1. Pendapatan Asli Daerah	170.624,04	179.062,77	357.121,62	
1.1. Hasil Pajak Daerah	78.228,16	90.096,06	98.010,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	60.727,60	34.845,60	107.925,82	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.830,54	3.110,26	0,00	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.837,74	51.010,85	151.185,80	
2. Dana Perimbangan	769.736,71	1.058.027,54	871.478,02	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.351,62	28.842,65	30.789,59	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	629.906,64	674.633,29	674.633,29	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	110.478,45	354.551,60	166.055,14	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	215.882,11	157.677,81	37.847,96	
3.1. Pendapatan Hibah	0,00	63.278,33	0,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	48.669,54	50.193,24	30.347,96	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	163.980,15	39.764,83	7.500,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	585,00	966,01	0,00	
3.6. Dana Desa		0,00	0,00	
3.7. Lainnya	2.647,42	3.475,40	0,00	

Tabel 18
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Baubau Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi			Rencana
	2015	2016	2017	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
PENDAPATAN DAERAH	801.908,11	866.176,70	797.729,49	
1. Pendapatan Asli Daerah	57.507,65	69.322,98	60.649,46	
1.1. Hasil Pajak Daerah	13.389,63	18.387,40	15.000,00	
1.2. Hasil Retribusi Daerah	3.488,42	4.594,52	5.109,24	
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.344,17	4.604,69	4.604,70	
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.285,43	41.736,37	35.935,52	
2. Dana Perimbangan	653.045,65	677.862,11	714.643,46	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.278,43	19.643,30	17.390,48	
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	485.032,23	518.115,29	546.258,93	
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	144.734,99	140.103,52	150.994,05	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	91.354,81	118.991,61	22.436,57	
3.1. Pendapatan Hibah	5.590,23	0,00	3.500,00	
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	16.094,41	19.680,87	11.436,57	
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	68.215,14	97.916,80	7.500,00	
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	926,96	1.115,00	0,00	
3.6. Dana Desa		0,00	0,00	
3.7. Lainnya	528,07	278,94	0,00	

Lampiran 2

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Sulawesi
Tenggara Menurut Jenis Belanja, Tahun Anggaran
2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran
2017**

Tabel 19
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	2.349.274,47	2.663.870,37	3.597.160,28
1. Belanja Tidak Langsung	1.235.549,81	1.466.650,01	2.439.650,18
1.1. Belanja Pegawai	491.167,57	531.192,91	1.298.460,83
1.2. Belanja Bunga	21.128,25	18.805,02	12.227,47
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	419.566,40	579.245,51	707.025,07
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	217.328,40	284.325,28	376.926,98
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	86.359,19	53.081,29	34.545,83
1.8. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	10.464,00
2. Belanja Langsung	1.113.724,66	1.197.220,36	1.157.510,10
2.1. Belanja Pegawai	55.814,26	61.282,81	61.819,44
2.2. Belanja Barang dan Jasa	374.401,88	384.020,43	321.137,53
2.3. Belanja Modal	683.508,52	751.917,12	774.553,13

Tabel 20
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	732.928,75	787.226,00	756.946,74
1. Belanja Tidak Langsung	348.817,13	380.247,77	432.677,52
1.1. Belanja Pegawai	296.847,24	267.671,68	302.138,69
1.2. Belanja Bunga	1.740,52	4.766,69	4.914,82
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	12.993,38	31.232,00	12.858,53
1.5. Belanja Bantuan Sosial	258,62	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36.430,22	76.577,40	112.265,48
1.8. Belanja Tidak Terduga	547,15	0,00	500,00
2. Belanja Langsung	384.111,62	406.978,23	324.269,22
2.1. Belanja Pegawai	23.857,14	21.908,15	23.085,92
2.2. Belanja Barang dan Jasa	88.303,46	120.144,50	102.320,01
2.3. Belanja Modal	271.951,02	264.925,58	198.863,29

Tabel 21
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH	965.609,24	1.238.622,35	1.103.792,10
1. Belanja Tidak Langsung	569.684,13	679.279,79	656.665,04
1.1. Belanja Pegawai	488.835,90	561.181,51	465.107,64
1.2. Belanja Bunga	1.000,08	7.002,01	8.702,00
1.3. Belanja Subsidi	1.424,86	2.260,33	8.000,00
1.4. Belanja Hibah	27.725,00	7.426,11	6.726,00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	25,00	990,11	977,63
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	50.513,29	100.219,72	166.635,72
1.8. Belanja Tidak Terduga	160,00	200,00	516,05
2. Belanja Langsung	395.925,11	559.342,56	447.127,06
2.1. Belanja Pegawai	29.679,88	31.335,01	33.593,67
2.2. Belanja Barang dan Jasa	85.603,02	116.040,34	123.299,01
2.3. Belanja Modal	280.642,21	411.967,21	290.234,38

Tabel 22
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH	1.051.693,54	1.189.502,02	1.636.150,42
1. Belanja Tidak Langsung	574.504,04	661.895,03	900.637,75
1.1. Belanja Pegawai	477.475,45	491.133,10	560.894,47
1.2. Belanja Bunga	13,62	8,64	6.000,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	4.500,00	7.065,60	31.419,00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	906,50	430,50	7.583,31
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	90.709,45	162.388,67	293.740,97
1.8. Belanja Tidak Terduga	899,02	868,52	1.000,00
2. Belanja Langsung	477.189,50	527.606,99	735.512,67
2.1. Belanja Pegawai	31.440,48	23.334,64	22.194,49
2.2. Belanja Barang dan Jasa	240.674,40	233.014,49	301.282,92
2.3. Belanja Modal	205.074,62	271.257,86	412.035,26

Tabel 23
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja <i>I</i>	Realisasi		Rencana
	2015 <i>2</i>	2016 <i>3</i>	2017 <i>4</i>
BELANJA DAERAH	1.046.447,93	1.055.207,53	1.149.771,35
1. Belanja Tidak Langsung	477.114,82	519.860,93	596.829,40
1.1. Belanja Pegawai	410.564,53	414.187,70	417.812,15
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	6.200,00	3.278,76	10.275,00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	2.577,97	5.019,58	1.494,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	56.798,64	97.374,89	165.748,25
1.8. Belanja Tidak Terduga	973,68	0,00	1.500,00
2. Belanja Langsung	569.333,11	535.346,60	552.941,95
2.1. Belanja Pegawai	52.128,62	51.199,71	54.775,62
2.2. Belanja Barang dan Jasa	223.834,41	188.267,46	200.777,37
2.3. Belanja Modal	293.370,08	295.879,43	297.388,96

Tabel 24
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH	1.003.732,92	1.191.086,98	1.265.141,01
1. Belanja Tidak Langsung	574.867,18	744.640,87	828.577,38
1.1. Belanja Pegawai	403.844,98	463.632,94	484.525,32
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	30.368,40	2.095,40	2.117,60
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	140.653,80	278.212,73	340.934,46
1.8. Belanja Tidak Terduga	0,00	699,80	1.000,00
2. Belanja Langsung	428.865,74	446.446,11	436.563,63
2.1. Belanja Pegawai	15.977,81	21.668,11	23.379,86
2.2. Belanja Barang dan Jasa	159.533,59	191.985,15	181.768,15
2.3. Belanja Modal	253.354,34	232.792,85	231.415,62

Tabel 25
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
	I	2	3
BELANJA DAERAH			
	723.296,14	860.382,99	796.351,24
1. Belanja Tidak Langsung	342.459,13	425.246,06	481.043,78
1.1. Belanja Pegawai	265.204,30	276.153,72	310.917,00
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	57,17	49,31	30,00
1.4. Belanja Hibah	1.843,25	27.813,31	17.465,95
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.737,00	6.543,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	74.426,97	117.525,54	144.287,83
1.8. Belanja Tidak Terduga	927,44	1.967,18	1.800,00
2. Belanja Langsung	380.837,01	435.136,93	315.307,46
2.1. Belanja Pegawai	24.404,64	23.411,67	22.373,28
2.2. Belanja Barang dan Jasa	120.544,96	117.948,18	131.691,54
2.3. Belanja Modal	235.887,41	293.777,08	161.242,64

Tabel 26
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH	676.839,83	746.959,56	736.072,70
1. Belanja Tidak Langsung	306.414,35	357.318,15	352.947,82
1.1. Belanja Pegawai	233.659,90	252.560,90	234.656,76
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	24.880,07	8.879,02	5.161,80
1.5. Belanja Bantuan Sosial	111,50	1.073,53	3.455,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	856,31
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	47.472,57	94.796,25	107.479,52
1.8. Belanja Tidak Terduga	290,31	8,45	1.338,43
2. Belanja Langsung	370.425,48	389.641,41	383.124,88
2.1. Belanja Pegawai	23.446,38	25.980,92	27.637,43
2.2. Belanja Barang dan Jasa	132.420,85	135.842,88	156.669,27
2.3. Belanja Modal	214.558,25	227.817,61	198.818,18

Tabel 27
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
	I	2	3
BELANJA DAERAH			
	754.213,70	872.676,62	848.448,85
1. Belanja Tidak Langsung	304.407,17	395.929,45	486.753,02
1.1. Belanja Pegawai	220.643,93	244.084,39	314.664,96
1.2. Belanja Bunga	0,00	46,36	9.000,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	7.723,21	30.728,45	11.060,74
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	244,20	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	974,16
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.040,37	116.886,07	150.009,98
1.8. Belanja Tidak Terduga	4.999,66	3.939,98	1.043,18
2. Belanja Langsung	449.806,53	476.747,17	361.695,83
2.1. Belanja Pegawai	45.430,52	23.802,86	23.860,85
2.2. Belanja Barang dan Jasa	134.221,38	171.357,70	125.327,00
2.3. Belanja Modal	270.154,63	281.586,61	212.507,98

Tabel 28
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	563.829,60	638.194,93	616.190,30
1. Belanja Tidak Langsung	227.185,47	250.304,17	277.971,01
1.1. Belanja Pegawai	153.982,53	169.723,32	166.872,83
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	25.507,77	973,66	2.150,00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	576,75	1.303,22	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	424,12
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	47.118,42	78.303,97	107.824,07
1.8. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	700,00
2. Belanja Langsung	336.644,13	387.890,76	338.219,28
2.1. Belanja Pegawai	9.141,74	10.246,69	13.884,88
2.2. Belanja Barang dan Jasa	106.070,26	148.310,16	138.150,59
2.3. Belanja Modal	221.432,13	229.333,91	186.183,81

Tabel 29
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja <i>I</i>	Realisasi		Rencana
	2015 <i>2</i>	2016 <i>3</i>	2017 <i>4</i>
BELANJA DAERAH	700.206,29	805.117,99	754.144,86
1. Belanja Tidak Langsung	265.271,81	338.809,07	400.718,13
1.1. Belanja Pegawai	173.054,12	201.448,00	217.913,15
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	18.210,00	6.553,80	6.500,00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	2.070,00	5.767,50
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	74.007,69	128.237,27	169.037,48
1.8. Belanja Tidak Terduga		500,00	1.500,00
2. Belanja Langsung	434.934,48	466.308,92	353.426,73
2.1. Belanja Pegawai	29.697,54	28.329,69	30.814,34
2.2. Belanja Barang dan Jasa	173.406,10	174.955,05	158.391,34
2.3. Belanja Modal	231.830,84	263.024,18	164.221,05

Tabel 30
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	512.990,14	621.370,71	632.466,52
1. Belanja Tidak Langsung	220.136,33	285.738,27	313.844,44
1.1. Belanja Pegawai	140.227,50	161.456,04	172.523,88
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	500,00	1.000,00
1.4. Belanja Hibah	20.520,03	5.715,92	4.738,80
1.5. Belanja Bantuan Sosial	202,50	267,50	0,00
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	58.386,30	116.376,61	134.081,76
1.8. Belanja Tidak Terduga	800,00	1.422,20	1.500,00
2. Belanja Langsung	292.853,81	335.632,44	318.622,08
2.1. Belanja Pegawai	19.680,18	16.915,51	7.458,13
2.2. Belanja Barang dan Jasa	97.719,93	105.245,48	126.644,83
2.3. Belanja Modal	175.453,70	213.471,45	184.519,12

Tabel 31
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	397.766,08	524.672,60	539.354,75
1. Belanja Tidak Langsung	96.256,84	129.700,93	191.946,41
1.1. Belanja Pegawai	57.600,69	80.713,58	86.477,85
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	16.126,94	1.332,44	442,20
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.529,21	47.638,55	104.026,36
1.8. Belanja Tidak Terduga	0,00	16,36	1.000,00
2. Belanja Langsung	301.509,24	394.971,67	347.408,34
2.1. Belanja Pegawai	3.625,44	2.923,30	3.291,51
2.2. Belanja Barang dan Jasa	87.556,94	99.952,38	107.340,39
2.3. Belanja Modal	210.326,86	292.095,99	236.776,44

Tabel 32
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	395.063,24	505.329,08	679.905,90
1. Belanja Tidak Langsung	140.313,62	240.230,30	298.919,65
1.1. Belanja Pegawai	108.370,19	149.830,11	184.596,72
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	770,00	30.474,00	9.665,20
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17,00	0,00	130,02
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.856,43	59.926,19	103.592,71
1.8. Belanja Tidak Terduga	300,00		935,00
2. Belanja Langsung	254.749,62	265.098,78	380.986,25
2.1. Belanja Pegawai	5.453,26	7.733,58	18.192,15
2.2. Belanja Barang dan Jasa	69.492,55	41.047,18	125.478,10
2.3. Belanja Modal	179.803,81	216.318,02	237.316,00

Tabel 33
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	284.365,61	543.055,58	551.916,64
1. Belanja Tidak Langsung	149.872,04	233.963,33	283.305,20
1.1. Belanja Pegawai	117.210,12	137.855,27	181.708,33
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	32.241,31	26.195,40	8.353,80
1.5. Belanja Bantuan Sosial	420,61	0,00	0,00
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	69.912,66	92.993,07
1.8. Belanja Tidak Terduga	0,00		250,00
2. Belanja Langsung	134.493,57	309.092,25	268.611,44
2.1. Belanja Pegawai	5.744,34	16.976,03	24.872,16
2.2. Belanja Barang dan Jasa	25.951,44	60.781,09	96.480,93
2.3. Belanja Modal	102.797,79	231.335,13	147.258,35

Tabel 34
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	184.239,15	466.813,32	513.786,92
1. Belanja Tidak Langsung	121.333,31	237.144,19	259.622,43
1.1. Belanja Pegawai	93.126,36	146.291,29	158.762,52
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	100,00	24.544,00	13.884,01
1.5. Belanja Bantuan Sosial	304,29	562,91	1.000,00
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	65.745,99	0,00
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.802,66	0,00	84.975,90
1.8. Belanja Tidak Terduga	0,00		1.000,00
2. Belanja Langsung	62.905,84	229.669,13	254.164,49
2.1. Belanja Pegawai	3.191,25	10.287,99	14.634,23
2.2. Belanja Barang dan Jasa	24.287,52	73.627,48	87.006,94
2.3. Belanja Modal	35.427,07	145.753,66	152.523,32

Tabel 35
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Kendari Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	1.148.108,93	1.416.199,28	1.266.447,60
1. Belanja Tidak Langsung	591.357,50	672.121,40	679.829,57
1.1. Belanja Pegawai	587.995,15	637.427,56	654.533,85
1.2. Belanja Bunga	14,29	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	2.465,60	33.531,29	21.241,25
1.5. Belanja Bantuan Sosial	7,50	25,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	810,40	1.053,37	1.054,47
1.8. Belanja Tidak Terduga	64,56	84,18	3.000,00
2. Belanja Langsung	556.751,43	744.077,88	586.618,03
2.1. Belanja Pegawai	53.225,35	61.278,07	65.637,54
2.2. Belanja Barang dan Jasa	154.105,04	190.378,72	174.504,69
2.3. Belanja Modal	349.421,04	492.421,09	346.475,80

Tabel 36
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Baubau Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
BELANJA DAERAH			
	803.334,57	899.053,96	847.355,12
1. Belanja Tidak Langsung	357.754,09	380.306,82	388.573,32
1.1. Belanja Pegawai	356.232,11	376.321,30	371.025,12
1.2. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Hibah	1.105,00	3.652,80	14.769,40
1.5. Belanja Bantuan Sosial	110,00	55,00	45,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan			
1.6. Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
1.7. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	306,98	277,72	733,80
1.8. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	2.000,00
2. Belanja Langsung	445.580,48	518.747,14	458.781,80
2.1. Belanja Pegawai	23.951,36	18.397,30	15.758,70
2.2. Belanja Barang dan Jasa	167.294,14	201.396,17	210.726,09
2.3. Belanja Modal	254.334,98	298.953,67	232.297,01

Lampiran 3

**Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Sulawesi
Tenggara Menurut Jenis Pembiayaan, Tahun
Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan
Tahun Anggaran 2017**

Tabel 37
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	415.300,94	450.595,34	161.377,58
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	356.516,05	450.595,34	161.377,58
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	58.784,89	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	86.820,08	95.134,45	109.415,74
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23.000,00	12.000,00	32.000,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	63.820,08	83.134,45	77.415,74
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	450.595,34	501.311,98	-0,00

Tabel 38
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	218.681,59	89.599,21	66.448,54
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	168.178,13	89.599,21	22.252,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	50.503,46	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	44.196,54
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	600,66	15.611,43	15.626,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.985,56	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	600,66	12.625,87	15.626,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	89.755,63	63.954,92	0,00

Tabel 39
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	115.727,49	168.655,36	18.993,35
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.665,12	139.270,92	6.847,13
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	50.062,37	29.384,44	12.146,22
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.882,50	1.497,11	100,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	1.497,11	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	1.882,50	0,00	100,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	138.334,56	65.238,63	0,00

Tabel 40
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	7.665,86	59.057,08	200.998,90
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.564,88	25.382,55	5.000,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	33.599,10	195.968,90
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	75,43	30,00
1.8. Penerimaan Lainnya	100,98	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.909,93	7.480,67	27.186,25
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	3.719,35	2.000,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	6.909,93	3.761,32	25.186,25
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00		0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00		0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	25.382,55	36.931,34	0,00

Tabel 41
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.345,67	9.167,71	11.650,00
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.345,47	9.167,71	11.650,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,20	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500,00	500,00	1.000,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500,00	500,00	1.000,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	13.436,71	13.588,65	0,00

Tabel 42
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.224,14	52.564,51	39.023,34
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.224,14	52.564,51	39.023,34
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	300,00	0,00	0,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	300,00	0,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	52.564,51	86.662,98	0,00

Tabel 43
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	21.554,49	20.805,09	6.000,00
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.554,49	20.805,09	6.000,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	20.455,81	10.469,50	0,00

Tabel 44
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	66.081,61	59.229,46	43.908,59
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.045,61	59.228,46	43.426,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	482,59
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	36,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	1,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.589,88	9.029,12	28.931,28
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.704,00	6.098,16	9.500,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	885,88	2.930,96	19.431,28
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	59.208,46	48.575,55	0,00

Tabel 45
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.780,35	81.629,67	103.844,43
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.149,66	77.511,13	5.454,53
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	4.100,69	98.389,90
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	17,85	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Lainnya	8.630,69	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.926,14	4.100,69	11.950,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.800,00	0,00	1.250,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	9.126,14	4.100,69	10.700,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	77.662,52	22.392,18	0,00

Tabel 46
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	49.128,40	45.434,63	21.000,00
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.128,40	45.434,63	21.000,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.142,76	6.642,00	7.389,62
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000,00	4.000,00	2.500,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	1.142,76	2.642,00	4.889,62
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	45.434,63	21.706,21	0,00

Tabel 47
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	8.967,22	0,00	18.200,48
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.967,22	0,00	18.200,48
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	1.000,00	2.000,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	2.000,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.000,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-10.530,20	10.530,21	0,00

Tabel 48
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	10.414,22	26.765,07	0,00
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.329,22	26.765,07	0,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	85,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.458,80	7.801,01	0,20
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.458,80	2.500,00	0,20
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	5.301,01	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	26.765,07	43.149,25	0,00

Tabel 49
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	15.952,34	72.194,20	19.050,00
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.952,34	72.194,20	19.050,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	19.048,81	3.000,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.500,00	3.000,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	17.548,81	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	72.161,81	38.716,54	0,00

Tabel 50
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	2.710,21	61.430,12	119.030,30
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.710,21	61.430,12	119.030,30
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500,00	0,00	2.000,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	2.000,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	1.000,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	1.500,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	156.924,92	0,00

Tabel 51
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	55.993,01	17.143,05
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	32.383,09	17.143,05
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	23.609,92	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	55.512,79	62.372,04	0,00

Tabel 52
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	424,30	9.631,01	15.980,00
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	424,30	9.631,01	15.980,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	1.000,00	2.000,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.000,00	2.000,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	9.400,16	59.522,20	0,00

Tabel 53
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Kendari Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	85.048,82	93.104,30	0,00
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84.151,79	93.022,67	0,00
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	897,03	81,63	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	160,08	63.278,33	0,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	63.278,33	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	160,08	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	93.022,67	8.394,81	0,00

Tabel 54
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Baubau Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015-2016 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
(Juta Rupiah)

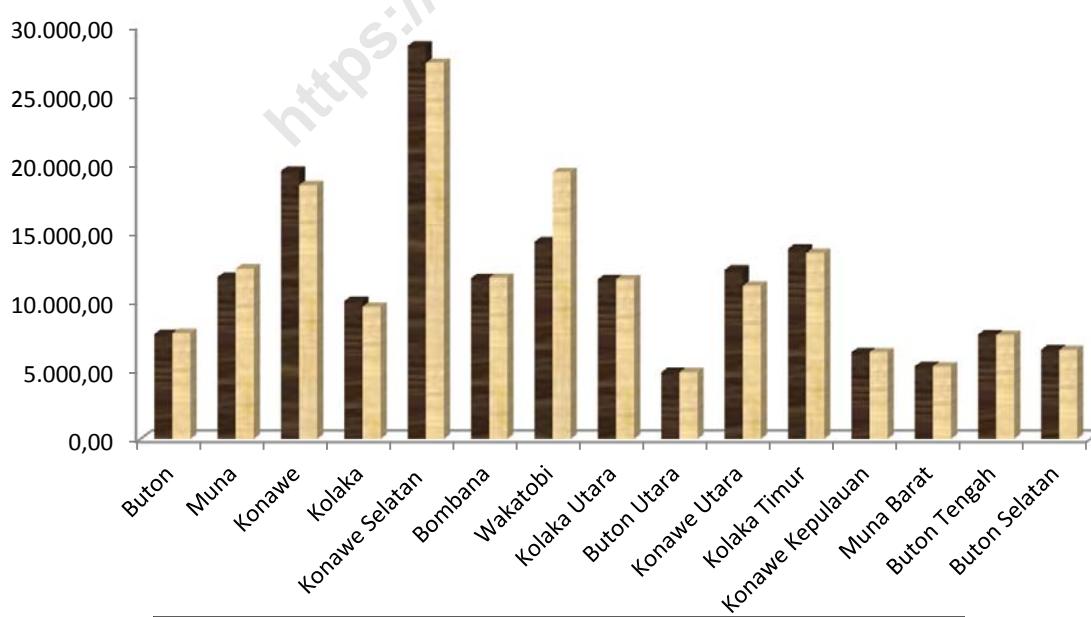
Jenis Pembiayaan	Realisasi		Rencana
	2015	2016	2017
I	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	179.448,44	178.021,97	55.773,90
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	179.428,64	178.021,97	55.773,90
1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	19,80	0,00	0,00
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
1.8. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	2.530,10	6.148,27
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.500,00	6.000,00
2.3. Pembayaran Pokok Utang	0,00	30,10	148,27
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.5. Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	178.021,98	142.614,61	0,00

Lampiran 4

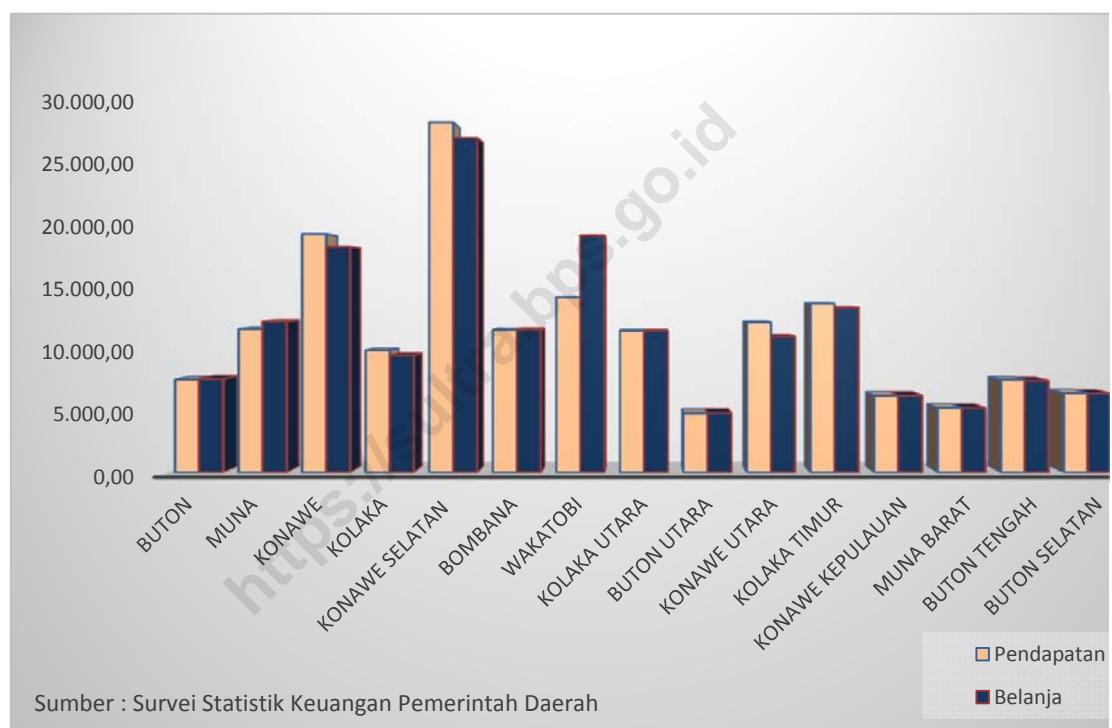
**Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan
di Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Jenis Pendapatan, Tahun Anggaran 2014-
2016**

	Pendapatan	Belanja
Buton	7.635,96	7.696,45
Muna	11.788,69	12.392,92
Konawe	19.497,26	18.461,04
Kolaka	10.050,24	9.604,81
Konawe Selatan	28.593,03	27.349,00
Bombana	11.705,39	11.736,40
Wakatobi	14.358,27	19.398,42
Kolaka Utara	11.616,73	11.614,57
Buton Utara	4.845,89	4.850,55
Konawe Utara	12.312,10	11.145,29
Kolaka Timur	13.837,27	13.522,53
Konawe Kepulauan	6.304,65	6.304,65
Muna Barat	5.286,74	5.265,73
Buton Tengah	7.609,27	7.548,16
Buton Selatan	6.510,38	6.476,72

	Pendapatan	Belanja
-60,49	7.635.963,00	7.696.451,00
-604,23	11.788.692,00	12.392.918,00
1.036,22	19.497.258,00	18.461.035,00
445,44	10.050.244,00	9.604.808,00
1.244,03	28.593.025,00	27.349.000,00
-31,01	11.705.390,00	11.736.395,00
-5.040,15	14.358.270,00	19.398.423,00
2,17	11.616.731,00	11.614.565,00
-4,67	4.845.885,00	4.850.553,00
1.166,81	12.312.101,00	11.145.289,00
314,73	13.837.265,00	13.522.531,00
0,00	6.304.645,00	6.304.645,00
21,02	5.286.744,00	5.265.725,00
61,12	7.609.273,00	7.548.157,00
33,66	6.510.383,00	6.476.724,00



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah





<https://ultra.bps.go.id>

Lampiran 5

**Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan di
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut
Jenis Belanja, Tahun Anggaran 2014-2016**

Tabel 70
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016**
	I	2	3
BELANJA	5.288.592,00	11.505.243,00	7.696.451,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	1.707.800,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	1.362.000,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	258.800,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	40.000,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	47.000,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	5.247.257,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	229.390,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	3.145.221,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	1.872.646,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	412.500,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	91.700,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	320.800,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	300.894,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	132.925,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	167.969,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	28.000,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	28.000,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

** Tidak Termasuk Kabupaten Pemekaran

Tabel 71
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
BELANJA	8.412.040,00	11.888.766,00	12.392.618,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	2.631.043,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	1.597.338,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	998.705,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	29.500,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	5.500,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	9.107.364,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	8.383.761,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	0,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	723.603,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	195.200,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	184.200,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	11.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	459.011,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	166.005,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	293.006,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	0,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	0,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 72
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
I	2	3	4
BELANJA	7.614.571,00	10.908.063,26	18.461.035,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	2.582.722,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	1.819.710,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	289.456,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	79.999,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	374.300,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	19.257,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	13.840.953,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	2.925.532,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	4.031.915,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	6.883.506,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	350.533,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	164.960,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	185.573,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	1.533.301,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	555.940,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	977.361,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	153.526,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	19.900,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	133.626,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 73
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
	I	2	3
BELANJA	2.973.250,00	5.655.163,00	9.604.808,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	3.019.813,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	1.716.204,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	314.612,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	62.458,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	0,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	926.539,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	5.112.628,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	1.693.183,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	1.426.731,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	1.992.714,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	669.315,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	136.868,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	532.447,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	623.521,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	84.826,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	538.695,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	179.531,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	58.681,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	120.850,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 74
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Selatan
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
I	2	3	4
BELANJA	6.547.512,00	14.755.301,00	27.349.000,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	5.685.801,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	3.511.532,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	970.161,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	225.735,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	663.500,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	314.873,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	17.838.483,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	507.493,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	1.600.298,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	15.730.692,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	454.689,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	2.560,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	452.129,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	3.364.677,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	610.626,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	2.754.051,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	5.350,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	5.350,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 75
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Bombana
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
	I	2	3
BELANJA	4.275.000,00	7.668.422,00	11.736.395,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	2.988.322,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	1.994.300,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	740.925,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	110.600,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	29.850,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	112.647,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	7.264.698,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	1.117.278,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	2.723.806,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	3.423.614,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	937.750,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban	--	--	291.600,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	646.150,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	543.625,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	331.000,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	212.625,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	2.000,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	2.000,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 76
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
BELANJA	2.576.730,00	5.723.621,00	19.398.423,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	12.385.400,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	4.941.151,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	4.991.104,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	2.453.145,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	0,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	3.622.878,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	1.326.985,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	1.099.812,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	1.196.081,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	1.252.268,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	273.997,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	978.271,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	755.084,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	200.022,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	555.062,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	1.382.793,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	1.382.793,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 77
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Utara
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
	I	2	3
BELANJA	3.386.426,00	7.176.521,00	11.614.565,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	3.110.320,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	2.139.850,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	906.320,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	64.150,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	0,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	6.842.759,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	507.922,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	4.321.826,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	2.013.011,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	264.900,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman	--	--	0,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	264.900,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	1.396.586,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	291.734,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	1.104.852,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	0,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	0,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 78
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton Utara
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
	I	2	3
BELANJA	878.542,00	3.841.555,00	4.850.553,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	1.375.011,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	977.400,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	391.611,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	6.000,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	0,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	2.398.225,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	0,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	1.792.113,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	606.112,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	237.128,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban	--	--	108.300,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	128.828,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	840.189,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	193.448,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	646.741,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	0,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	0,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 79
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Utara
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
	I	2	3
BELANJA	3.664.564,00	6.358.195,00	11.145.289,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	2.614.612,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	1.110.027,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	1.140.445,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	59.040,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	305.100,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	7.692.542,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	0,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	0,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	7.692.542,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	490.309,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban	--	--	0,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	490.309,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	347.826,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	288.000,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	59.826,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	0,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	0,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 80
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
	I	2	3
BELANJA	1.819.700,00	3.368.050,00	13.522.531,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	4.228.420,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	3.137.953,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	767.978,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	91.604,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	230.885,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	7.726.323,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	2.882.818,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	2.859.549,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	1.983.956,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	786.702,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	237.302,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	549.400,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	781.086,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	436.903,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	344.183,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	0,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	0,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 81
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Kepulauan
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014*	2015*	2016
I	2	3	4
BELANJA	940.734,00	3.255.953,00	6.304.645,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	1.240.090,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	674.224,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	435.203,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	44.263,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	86.400,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	4.128.309,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	423.053,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	1.947.322,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	1.757.934,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	174.324,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	--	--	15.820,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	158.504,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	706.170,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	208.262,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	497.908,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	55.752,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	15.000,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	40.752,00

Keterangan: * Perbedaan Rincian

Tabel 82
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Barat
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014***	2015***	2016
	I	2	3
BELANJA	0,00	0,00	5.265.725,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	808.250,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	496.348,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	164.309,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	40.640,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	58.800,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	48.153,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	3.538.977,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	2.846.879,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	475.000,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	217.098,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	104.440,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban	--	--	98.740,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	5.700,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	800.421,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	259.700,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	540.721,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	13.637,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	11.637,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	2.000,00

Keterangan : *** Masih Bergabung dengan Kabupaten Induk

Tabel 83
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton Tengah
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014***	2015***	2016
	I	2	3
BELANJA	0,00	0,00	7.548.157,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	2.492.299,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	2.186.450,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	298.111,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	7.738,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	0,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	3.818.778,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	540.037,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	1.994.374,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	1.284.367,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	646.240,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban	--	--	276.740,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	369.500,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	562.757,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	89.635,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	473.122,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	28.083,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	28.083,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	0,00

Keterangan : *** Masih Bergabung dengan Kabupaten Induk

Tabel 84
Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton Selatan
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014-2016
(Ribu Rupiah)

Jenis Belanja	2014***	2015***	2016
	I	2	3
BELANJA	0,00	0,00	6.476.724,00
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	--	--	1.632.765,00
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan	--	--	1.164.057,00
2.1.2 Operasional Perkantoran	--	--	405.289,00
2.1.3 Operasional BPD	--	--	45.419,00
2.1.4 Operasional RT/RW	--	--	18.000,00
2.1.5 Kegiatan lainnya	--	--	0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--	--	3.786.952,00
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi	--	--	474.731,00
2.2.2 Perbaikan Jalan Desa	--	--	1.144.501,00
2.2.3 Kegiatan Lainnya	--	--	2.167.720,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	--	--	419.565,00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban	--	--	59.445,00
2.3.2 Kegiatan Lainnya	--	--	360.120,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	--	--	577.442,00
2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	--	--	128.229,00
2.4.2 Kegiatan Lainnya	--	--	449.213,00
2.5 Bidang Tak Terduga	--	--	60.000,00
2.5.1 Kegiatan Kejadian luar Biasa	--	--	0,00
2.5.2 Kegiatan Lainnya	--	--	60.000,00

Keterangan : *** Masih Bergabung dengan Kabupaten Induk

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No.1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp:0401-3135363; Fax:0401-3122355; e-mail:bps7400@bps.go.id
Website <http://sultra.bps.go.id>

